

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bhakti. Bandung

Ali Imron. 2015. *Legal responsibility: membumikan asas hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar bekerja sama dengan LP2M UIN Walisongo. Semarang.

Aminuddin Ilmar. 2020. *Memaknai Kepemerintahan yang Baik: Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintah*. Phinatama Media. Makassar.

Amirudidin dan Zainal Asikini. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Bagir Manan. *Dpr, Dpd, Dan Mpr Dalam Uud 1945 Baru*. FH UII Press. 2004.

Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Dalam Shidarta. L. J. Van Apeldoorn. 2009. *Moralitas Profesi Hukum: suatu tawaran kerangka berpikir*. . PT. Repika Aditama. Bandung.

Jimly Asshiddiqie. 2019. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Nyoman Serikat Putra Jaya. 2004. *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas Dan Asas Keadilan*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Kencana. Jakarta.

----- . 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11, Kencana. Jakarta.

Philipus M. Hadjon, *et al.* 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Yogyakarta.

Romli Atmasasmita. 2005. *Di Balik Palu Mahkamah Konstitusi: Telaah Judicial Review Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. MTI. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung,  
Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan Adriaan Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

**Disertasi:**

Mirza Satria Buana. 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan*

*(Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

**Jurnal:**

Astrella Levina. 2018. *Status Hukum Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pada Saat Masih Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. *Juris-Diction*. Vol. 1. Nomor 2.

Julista. Mustamu. 2014. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol. 20. Nomor 2.

Mulyadi, M. 2012. *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 16. Nomor 1.

Tony Prayogo. 2018. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13. Nomor 2.

### **Internet:**

Fakultas Hukum Brawijaya. 2018. <https://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Keputusan-Tata-Usaha-Negara>. Diakses pada tanggal 30 November 2020.

Vincent Suriadinata. 2018. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/789328#:~:text=Salah%20satu%20prinsip%20penting%20dalam,sebaliknya%20dan%20dinyatakan%20oleh%20hakim>. Diakses pada tanggal 30 November 2020.

### **Makalah:**

Arsil. 2005. *Seputar Masalah Asas Non-Retroaktif*, Makalah. Diskusi Publik Masa Depan KPK Pasca Putusan Judicial Review UU KPK. Jakarta.

Sjahan Basah. 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni. Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Sanksi Administratif

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

#### **Putusan Pengadilan:**

Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 (tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan kalimat 'pidana umum' pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN. BNA. (tentang Sengketa Kepegawaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara).

